

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memberikan landasan yang kuat bagi pemahaman lebih dalam mengenai kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan pencegahan stunting. Dengan mengkaji berbagai jurnal administrasi publik yang relevan, penelitian ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana kebijakan implementasi di berbagai daerah, termasuk Kota Bengkulu, dapat dianalisis dan disempurnakan. Penelitian terdahulu mengungkapkan berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan kebijakan publik, seperti komunikasi antar instansi, keterlibatan masyarakat, serta peran anggaran dalam mendukung kebijakan tersebut. Kajian ini menjadi referensi dalam merumuskan masalah dan tujuan penelitian terkait kebijakan pencegahan stunting di Kota Bengkulu.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2020) mengenai efektivitas kebijakan penurunan stunting di Indonesia menggarisbawahi pentingnya koordinasi yang efektif antarinstansi dalam pelaksanaan program pencegahan stunting. Meskipun kebijakan tersebut telah dirancang dengan baik di tingkat nasional, implementasinya sering kali terkendala oleh kurangnya sinergi antara lembaga-lembaga terkait serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam program-program tersebut. Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada integrasi dan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun

masyarakat. Penelitian ini memiliki keterkaitan yang erat dengan penelitian yang sedang dilakukan, yang juga berfokus pada analisis implementasi kebijakan pencegahan stunting, khususnya di Kota Bengkulu. Persamaan utama antara kedua penelitian terletak pada fokus untuk menilai efektivitas implementasi kebijakan serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Namun, perbedaan signifikan terletak pada cakupan penelitian, di mana penelitian ini lebih terfokus pada konteks lokal Kota Bengkulu, dengan mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang unik di daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika lokal yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan pencegahan stunting di tingkat kota, yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan tersebut.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sari et al. (2021), yang meneliti kebijakan pencegahan stunting di daerah tertinggal, ditemukan bahwa kebijakan pencegahan stunting di daerah-daerah tersebut seringkali tidak berjalan dengan optimal karena terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran. Hal ini sejalan dengan tujuan peneliti yang bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan di Kota Bengkulu. Persamaan terletak pada analisis faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan, namun perbedaannya ada pada fokus lokasi, karena penelitian akan lebih menekankan pada kondisi Kota Bengkulu yang memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Gunawan (2019) mengenai peran pemerintah daerah dalam penanganan stunting menunjukkan bahwa kolaborasi antar lembaga pemerintah dan pihak swasta sangat penting dalam mendorong keberhasilan program stunting. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian , karena keduanya meneliti peran pemerintah daerah dalam kebijakan pencegahan stunting. Namun, penelitian peneliti lebih berfokus pada strategi yang dapat diusulkan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, sementara penelitian ini lebih fokus pada peran pemerintah.

Sebagai kajian yang relevan, penelitian oleh Hermawan (2022) yang menganalisis pengaruh anggaran terhadap kebijakan pencegahan stunting di Indonesia mengungkapkan bahwa anggaran yang terbatas seringkali menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan kebijakan yang efektif. Ini terkait erat dengan penelitian yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis guna meningkatkan efektivitas kebijakan pencegahan stunting di Kota Bengkulu. Persamaannya terletak pada fokus pada faktor anggaran, sementara perbedaannya terletak pada fokus yang lebih spesifik pada Kota Bengkulu dalam penelitian.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Putri et al. (2018), ditemukan bahwa faktor sosial, ekonomi, dan budaya sangat mempengaruhi prevalensi stunting di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan harus mempertimbangkan faktor-faktor lokal yang spesifik. Persamaan dengan penelitian ini adalah keduanya menekankan pentingnya pemahaman terhadap faktor-faktor lokal dalam mengimplementasikan

kebijakan, namun perbedaannya terletak pada fokus yang lebih mendalam pada analisis kebijakan pencegahan stunting di Kota Bengkulu dalam penelitian.

Penelitian oleh Dwi (2022) yang meneliti strategi penyuluhan gizi untuk pencegahan stunting di daerah Jawa Tengah menunjukkan bahwa penyuluhan yang efektif dapat menurunkan angka stunting secara signifikan. Penelitian ini relevan dengan penelitian karena keduanya meneliti tentang strategi yang dapat diusulkan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Persamaannya adalah fokus pada strategi penyuluhan, namun perbedaannya terletak pada lokasi dan konteks kebijakan yang lebih terfokus pada Kota Bengkulu dalam penelitian.

Secara umum, penelitian terdahulu memberikan banyak wawasan yang berguna dalam merancang penelitian tentang kebijakan pencegahan stunting di Kota Bengkulu. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu terletak pada fokus pada efektivitas implementasi kebijakan dan strategi yang dapat diusulkan untuk meningkatkan kebijakan tersebut. Perbedaan utamanya adalah konteks lokal yang lebih spesifik di Kota Bengkulu, serta penekanan pada faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi kebijakan tersebut. Penelitian terdahulu memberikan dasar yang kuat dalam merumuskan masalah dan tujuan penelitian, serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dalam kebijakan pencegahan stunting di Kota Bengkulu.

2.2 Kajian Teoritis

Kajian teoritis dalam penelitian ini berperan sebagai landasan konseptual dalam memahami kebijakan pencegahan stunting, khususnya di Kota Bengkulu. Penelitian ini mengacu pada teori kebijakan publik yang menjelaskan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Selain itu, teori implementasi kebijakan digunakan untuk menganalisis tantangan dalam penerapan kebijakan, seperti koordinasi antarinstansi, alokasi sumber daya, dan partisipasi masyarakat. Teori governance juga menjadi fokus utama, menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pencegahan stunting.

Dengan mengintegrasikan teori-teori tersebut, kajian ini berupaya memberikan pemahaman holistik mengenai kebijakan pencegahan stunting dan menelaah kesenjangan antara teori dan praktik di lapangan. Analisis ini diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor penghambat maupun pendukung dalam implementasi kebijakan, serta merumuskan strategi optimal guna meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program pencegahan stunting di Kota Bengkulu.

2.2.1 Konsep Kebijakan Menurut Para Ahli

a. Konsep Kebijakan Menurut Harold D. Lasswell (1949)

Harold D. Lasswell (1949), seorang ahli ilmu politik asal Amerika Serikat, mengemukakan teori kebijakan publik dalam bukunya yang berjudul **The Policy Sciences: Recent Developments in Scope and Method** pada tahun 1949. Lasswell

berpendapat bahwa kebijakan publik adalah suatu proses yang melibatkan beberapa pihak dan bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya secara adil dalam masyarakat. Konsep ini dikembangkan dengan menjawab empat pertanyaan utama: *Siapa yang memperoleh apa? Kapan? Dan bagaimana?* Pertanyaan ini menggambarkan proses pembuatan kebijakan yang harus memperhatikan siapa yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan siapa yang menjadi penerima manfaat dari kebijakan tersebut.

Menurut Lasswell, kebijakan tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang statis, melainkan sebagai bagian dari proses dinamis yang melibatkan analisis situasi sosial dan politik, identifikasi masalah, serta penerapan solusi yang melibatkan berbagai pihak. Kebijakan, dalam pandangan Lasswell, harus dapat memecahkan masalah sosial yang ada di masyarakat dengan cara yang tepat dan efisien. Oleh karena itu, kebijakan tidak hanya dilihat dari hasil akhirnya saja, tetapi juga dari proses yang dilalui untuk mencapainya.

Lebih lanjut, Lasswell menekankan pentingnya pemahaman terhadap konteks dan dinamika yang ada di masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik. Setiap kebijakan harus mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan politik yang dapat memengaruhi implementasi dan hasil dari kebijakan tersebut. Dalam hal ini, analisis terhadap siapa yang memiliki kekuasaan, siapa yang berhak mendapatkan manfaat, serta bagaimana

kebijakan tersebut dijalankan sangat penting untuk mencapai tujuan kebijakan yang efektif.

Akhirnya, teori Lasswell ini berfokus pada pembuatan kebijakan yang tidak hanya berdasarkan kepentingan satu kelompok saja, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Proses kebijakan yang dimaksud melibatkan berbagai tahapan, mulai dari identifikasi masalah, perumusan alternatif kebijakan, seleksi kebijakan yang paling tepat, hingga implementasi dan evaluasi. Dengan demikian, kebijakan publik harus dirancang dengan memperhatikan keadilan, keterlibatan semua pihak terkait, serta efektivitas dalam menyelesaikan masalah yang ada.

b. Konsep Kebijakan Menurut Prof. Dr. Eko Prasjo (2018)

Menurut Prof. Dr. Eko Prasjo (2018), seorang pakar kebijakan publik, kebijakan harus disusun dengan pendekatan rasional yang berlandaskan pada data yang valid dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Prof. Eko menekankan bahwa pengambil kebijakan perlu memanfaatkan data empiris yang akurat untuk merumuskan solusi yang tepat dan efektif dalam mengatasi masalah yang ada. Dalam hal ini, kebijakan terkait pencegahan stunting di Kota Bengkulu harus didasarkan pada analisis data prevalensi stunting, status gizi ibu dan anak, serta aksesibilitas terhadap layanan kesehatan di daerah tersebut. Sebagai contoh, jika hasil analisis menunjukkan bahwa rendahnya kualitas gizi pada ibu

hamil menjadi penyebab utama terjadinya stunting, maka kebijakan yang tepat dapat mencakup distribusi makanan bergizi, pemberian suplemen gizi, serta program edukasi kesehatan yang menyeluruh untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya asupan gizi yang baik. Pendekatan rasional ini memastikan bahwa kebijakan yang diambil relevan dengan kondisi nyata di lapangan dan dapat langsung fokus pada pemecahan masalah secara terukur. Indikator keberhasilan kebijakan ini meliputi akurasi data yang diperoleh, analisis mendalam terhadap faktor-faktor penyebab stunting, serta pelaksanaan solusi yang dapat diukur dampaknya, seperti peningkatan jumlah ibu hamil yang mengonsumsi makanan bergizi atau penurunan prevalensi stunting di wilayah tersebut. Dengan pendekatan ini, diharapkan kebijakan yang diimplementasikan dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam mencegah stunting dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bengkulu..

c. Konsep Kebijakan Publik menurut Riant Nugroho (2018)

Riant Nugroho (2018) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian keputusan strategis yang diambil oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengarahkan masyarakat ke arah kondisi yang lebih baik dan lebih sejahtera. Dalam perspektifnya, terdapat tiga aspek utama yang harus diperhatikan dalam proses perumusan kebijakan, yakni stabilitas, distribusi sumber daya, dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Stabilitas kebijakan memiliki

peran krusial dalam menjaga keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, baik dari segi ekonomi, politik, maupun sosial. Dengan adanya stabilitas, kebijakan yang diterapkan dapat berjalan secara konsisten dan tidak menimbulkan gejolak yang dapat menghambat pembangunan.

Selain itu, distribusi sumber daya yang adil menjadi faktor esensial agar kebijakan yang diterapkan dapat memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa adanya kesenjangan yang signifikan antara kelompok tertentu. Pemerataan akses terhadap sumber daya akan mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Di samping itu, Nugroho juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan kebijakan, mulai dari perumusan hingga implementasi. Partisipasi aktif masyarakat tidak hanya meningkatkan efektivitas kebijakan, tetapi juga memperkuat legitimasi dan dukungan publik terhadap kebijakan yang diterapkan. Dengan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, kebijakan yang dihasilkan akan lebih adaptif, responsif terhadap kebutuhan publik, serta memiliki daya tahan yang lebih kuat dalam menghadapi dinamika sosial dan ekonomi (Nugroho, 2018).

Untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pencegahan stunting di Kota Bengkulu, beberapa teori administrasi publik dan kebijakan publik akan digunakan. Salah satu teori yang relevan

adalah Teori Implementasi Kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975). Teori ini menjelaskan bahwa efektivitas implementasi kebijakan sangat tergantung pada berbagai faktor, antara lain komunikasi antarinstansi, alokasi sumber daya, dan disposisi pelaksana kebijakan. Dalam konteks penelitian ini, teori implementasi kebijakan akan digunakan untuk menganalisis hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan stunting di Kota Bengkulu, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalannya.

Selain itu, Teori Kebijakan Publik yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2007) akan digunakan untuk memahami proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan pencegahan stunting. Menurut teori ini, kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam hal ini, teori ini akan membantu untuk memahami bagaimana kebijakan pencegahan stunting di Kota Bengkulu disusun dan diterapkan, serta bagaimana peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan Teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), keberhasilan implementasi kebijakan dapat dianalisis melalui enam indikator utama, yaitu:

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Kebijakan harus memiliki tujuan yang jelas serta standar yang dapat diukur untuk memastikan keberhasilan implementasi. Dalam konteks pencegahan stunting, standar ini dapat berupa target penurunan prevalensi stunting, cakupan layanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita, serta ketersediaan program gizi yang memadai.

b. Sumber Daya

Implementasi kebijakan memerlukan sumber daya yang cukup, baik dalam bentuk anggaran, tenaga kerja, fasilitas, maupun informasi. Dalam pencegahan stunting, sumber daya ini mencakup ketersediaan tenaga kesehatan, akses terhadap makanan bergizi, serta dukungan logistik untuk pelaksanaan program.

c. Komunikasi Antarorganisasi

Keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada koordinasi yang baik antara berbagai instansi yang terlibat. Dalam kasus pencegahan stunting di Kota Bengkulu, efektivitas komunikasi antara Dinas Kesehatan, Puskesmas, Posyandu, serta pihak terkait lainnya akan menentukan seberapa baik kebijakan dapat diterapkan.

d. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Struktur birokrasi, kapasitas lembaga pelaksana, serta komitmen para pelaksana kebijakan akan memengaruhi efektivitas implementasi. Jika organisasi pelaksana memiliki tata kelola yang baik dan SDM yang kompeten, maka kebijakan pencegahan stunting dapat berjalan lebih optimal.

e. Disposisi (Sikap) Pelaksana Kebijakan

Sikap dan komitmen dari pihak yang menjalankan kebijakan sangat berpengaruh terhadap efektivitas implementasi. Jika pelaksana kebijakan, seperti tenaga kesehatan dan aparat daerah, memiliki pemahaman dan dukungan yang kuat terhadap program pencegahan stunting, maka pelaksanaannya akan lebih efektif.

f. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Faktor eksternal seperti kondisi sosial, ekonomi, dan politik juga dapat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam konteks pencegahan stunting, faktor seperti tingkat kemiskinan, kesadaran masyarakat terhadap gizi, serta dukungan politik dari pemerintah daerah menjadi elemen penting dalam mendukung kebijakan yang telah dirancang.

Dengan menggunakan enam indikator ini, penelitian dapat menganalisis sejauh mana kebijakan pencegahan stunting di Kota Bengkulu telah diimplementasikan dengan baik serta

mengidentifikasi kendala yang mungkin terjadi dalam pelaksanaannya.

2.3 Konsep Kebijakan Stunting di Indonesia

Masalah stunting di Indonesia telah menjadi perhatian utama pemerintah dalam beberapa tahun terakhir, mengingat dampaknya yang luas terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan. Sebagai respons terhadap masalah ini, pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan telah menetapkan sejumlah langkah untuk menanggulangi stunting. Pada tahun 2017, pemerintah meluncurkan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Peraturan ini menggarisbawahi pentingnya koordinasi antara berbagai sektor, termasuk kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan, serta mengarahkan agar upaya penurunan stunting dilakukan secara terpadu dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dari pemerintah pusat hingga daerah. Kebijakan ini mencakup berbagai strategi, seperti perbaikan gizi ibu hamil dan anak, penyuluhan kepada masyarakat, serta peningkatan layanan kesehatan primer melalui Posyandu dan Puskesmas.

Selain itu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah menargetkan penurunan angka stunting menjadi 14% pada tahun 2024. Kebijakan ini menjadi pedoman bagi kementerian dan lembaga pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya dan melakukan program yang mendukung upaya penurunan angka

stunting. Salah satu program utama yang diusulkan adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang memberikan bantuan sosial kepada keluarga miskin, dengan fokus pada ibu hamil dan balita, untuk memastikan mereka mendapatkan gizi yang cukup. Pemerintah juga mendorong pemerintah daerah untuk mengadaptasi kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing.

Di tingkat daerah, Kota Bengkulu juga telah mengadopsi kebijakan-kebijakan serupa yang mendukung upaya pencegahan stunting. Pemkot Bengkulu telah merumuskan kebijakan yang bersinergi dengan kebijakan nasional melalui peraturan daerah dan program-program yang sesuai dengan kondisi lokal. Peraturan Daerah Kota Bengkulu No. 4 Tahun 2018 tentang Pencegahan Stunting menjadi salah satu landasan hukum yang penting dalam mengatasi masalah stunting di kota ini. Peraturan ini menekankan pentingnya peran semua sektor, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi, untuk berkolaborasi dalam upaya pencegahan stunting.

Salah satu program unggulan yang diimplementasikan di Kota Bengkulu adalah Gerakan Cegah Stunting (GCS), yang melibatkan pihak-pihak terkait seperti Dinas Kesehatan, Posyandu, serta organisasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya gizi bagi ibu hamil dan anak. Selain itu, pemerintah kota juga meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Puskesmas dan Posyandu dengan memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan serta memperkuat penyuluhan kepada masyarakat mengenai pola makan sehat dan gizi yang

tepat. Meskipun kebijakan ini sudah ada, beberapa tantangan dalam implementasinya masih ditemukan, seperti koordinasi antarinstansi yang belum optimal dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam program-program tersebut.

2.4 Kerangka Berpikir

Implementasi kebijakan pencegahan stunting menjadi variabel utama yang diukur dalam penelitian ini. Pelaksanaan kebijakan ini mencakup berbagai intervensi yang dirancang pemerintah, seperti penyuluhan gizi, pemberian makanan tambahan, dan pemanfaatan kader kesehatan. Namun, keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada dua faktor utama: faktor pendukung dan faktor penghambat.

Pelaksanaan kebijakan ini mencakup berbagai intervensi yang dirancang oleh pemerintah, seperti penyuluhan gizi, pemberian makanan tambahan, serta pemanfaatan kader kesehatan. Namun, efektivitas implementasi kebijakan sangat bergantung pada dua faktor utama, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat, yang dapat dianalisis melalui enam indikator teori Van Meter dan Van Horn.

Faktor pendukung terdiri atas elemen-elemen yang memperkuat efektivitas kebijakan. Dari sisi sumber daya, keterlibatan aktif kader kesehatan, pemberian edukasi gizi berbasis keluarga, serta penggunaan pendekatan budaya lokal menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi kebijakan. Misalnya, dalam aspek komunikasi antarorganisasi,

keterlibatan tokoh agama dalam sosialisasi terbukti meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan stunting. Selain itu, disposisi pelaksana kebijakan, seperti motivasi kader kesehatan dan dukungan pelatihan secara berkala, menjadi aspek krusial dalam memastikan kebijakan berjalan secara optimal.

Sebaliknya, faktor penghambat mencakup tantangan-tantangan yang dapat menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam aspek sumber daya, kurangnya infrastruktur kesehatan dan minimnya tenaga kesehatan menjadi kendala yang signifikan. Komunikasi antarorganisasi yang lemah serta koordinasi lintas sektor yang tidak optimal juga dapat memperlambat pelaksanaan kebijakan. Di Kota Bengkulu, lingkungan sosial dan ekonomi, seperti kendala geografis dan keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan, menjadi tantangan utama dalam menjalankan program.

Dinamika antara faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan memiliki peran yang sangat krusial dalam menentukan tingkat efektivitas program pencegahan stunting di Kota Bengkulu. Interaksi antara kedua faktor tersebut tidak hanya memengaruhi proses pelaksanaan kebijakan secara langsung, tetapi juga mencerminkan sejauh mana kebijakan publik tersebut mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, khususnya dalam menurunkan prevalensi stunting di wilayah tersebut. Keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh optimalisasi penerapan enam indikator utama implementasi kebijakan, sebagaimana dirumuskan dalam teori implementasi kebijakan publik. Indikator-indikator tersebut meliputi: kejelasan standar dan sasaran kebijakan, ketersediaan dan

distribusi sumber daya, efektivitas komunikasi antarorganisasi dan antarlevel pemerintahan, karakteristik organisasi pelaksana yang adaptif dan responsif, disposisi atau sikap pelaksana kebijakan yang mendukung, serta kondisi lingkungan eksternal yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan politik. Apabila seluruh indikator ini mampu berjalan secara sinergis, terkoordinasi, dan diterapkan secara konsisten dalam kerangka sistem tata kelola yang baik (good governance), maka efektivitas kebijakan pencegahan stunting akan semakin meningkat secara signifikan.

Lebih lanjut, dukungan yang kuat dari berbagai aktor kunci, seperti tenaga kesehatan, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, serta partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri, menjadi faktor determinan dalam mendukung keberhasilan program. Kolaborasi lintas sektor dan penguatan kapasitas kelembagaan juga diperlukan untuk menjamin kesinambungan program. Dengan demikian, apabila implementasi kebijakan mampu mengelola dinamika antara faktor pendukung dan penghambat secara strategis dan adaptif, maka peluang untuk mencapai tujuan jangka panjang berupa peningkatan kualitas kesehatan anak serta terciptanya generasi masa depan yang sehat dan produktif akan semakin terbuka lebar dan dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

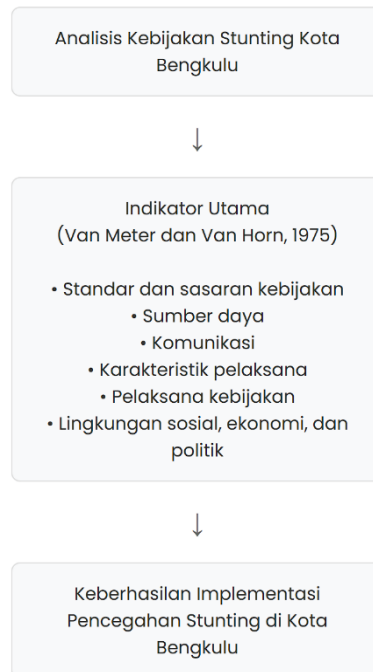


Diagram kerangka berpikir yang disajikan memberikan ilustrasi visual hubungan.

Berdasarkan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975), terdapat enam indikator utama yang menjadi dasar dalam menganalisis efektivitas pelaksanaan kebijakan ini.

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kejelasan tujuan serta standar yang dapat diukur, seperti target penurunan prevalensi stunting dan cakupan layanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita.

2. Sumber Daya

Sumber daya yang memadai, baik dalam bentuk anggaran, tenaga kerja, fasilitas, maupun informasi, menjadi faktor penentu keberhasilan program.

3. Komunikasi Antarorganisasi

Koordinasi yang efektif antara berbagai instansi, seperti Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Posyandu, sangat penting untuk memastikan kebijakan dapat diterapkan dengan optimal.

4. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Struktur birokrasi, kapasitas lembaga, serta komitmen pelaksana berperan dalam menentukan efektivitas implementasi kebijakan pencegahan stunting.

5. Disposisi (Sikap) Pelaksana Kebijakan

Dukungan dan pemahaman yang kuat dari tenaga kesehatan dan aparat daerah terhadap program ini akan berkontribusi pada efektivitas pelaksanaannya.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Faktor eksternal, seperti kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan dukungan politik dari pemerintah daerah, turut memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

Dengan mempertimbangkan keenam indikator ini, analisis dapat dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan pencegahan stunting di Kota Bengkulu telah diterapkan dengan efektif serta mengidentifikasi berbagai kendala yang mungkin muncul dalam proses implementasinya.

